

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT
MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
Di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik**



**OLEH
YOHANA FRANSISKA NIAT
2019210089
KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG**

2023

Yohana Fransiska Niat, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, 2023

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT
MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**

Studi di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Cahyo Sasmito, S.H., M.Si

Dosen Pembimbing Pendamping : Agustinus Ghunu, SE., MP., M.AP

RINGKASAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pengelolaan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti menggunakan metode purposive sampling untuk mengidentifikasi informan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti antara lain wawancara, observasi, pencatatan, dan analisis data dengan menggunakan teknik pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan teknik kecerdasan dasar membuat/penguatan inferensi. Hasil peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, dimana pemerintah desa berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan fasilitas yang berkualitas untuk kegiatan perencanaan pembangunan bersama masyarakat, komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga terbentuklah perencanaan membangun jalan beraspal untuk setiap jalur dan membangun jalan pertanian. Hal ini terlihat dari peran pemerintah sebagai fasilitator dalam mendorong pembangunan melalui pembangunan jalan aspal di setiap jalur dan pembangunan jalan aspal di lahan pertanian, dimana perangkat desa dapat memfasilitasi kemudahan akses bagi masyarakat dan pembangunan, dari perekonomian masyarakat. Terdapat faktor pemungkin yaitu tingkat dukungan atau partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur sehingga proses pembangunan berjalan lancar. Faktor penghambatnya adalah sebagian masyarakat belum memahami RKPDesa (Rencana Kerja Kewenangan Desa) tentang pembangunan infrastruktur.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Mensejahterakan Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

UU Desa dan peraturan pelaksanaannya no. 6 Tahun 2004 yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2014 Berdasarkan Pasal 1(1) bahwa desa adalah kota atau kota di Indonesia yang mempunyai peraturan perundang-undangan dan pemerintahan tersendiri. Aparat desa mengatur masyarakat desa berdasarkan adat istiadat setempat yang telah diterima masyarakat di desa tersebut. Perangkat kabupaten mengawasi desa dalam sistem pemerintahan, namun desa memiliki kekuasaan untuk mengatur urusan masyarakatnya sendiri.

Desa di Indonesia didefinisikan oleh undang-undang sebagai komunitas dengan hak dan tanggung jawab tertentu. UU Desa menyatakan bahwa setiap desa yang disebut desa, atau dengan nama yang berbeda, dianggap sebagai masyarakat hukum. Komunitas-komunitas ini memiliki kekuatan untuk mengatur urusan mereka sendiri dan melindungi kepentingan komunitas lokal mereka.

Desa-desa tersebut resmi tercantum dalam Perda 23 Tahun 2014 dan Peraturan Badan Desa No. 72 Tahun 2005. Secara hukum berarti kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas yang jelas dan budaya lokal dalam suatu kesatuan yang diatur dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan organisasi yang bertugas mengatur dan mengurus kelompoknya sendiri. Pemerintah kabupaten mempunyai hak pembangunan sehingga dapat menghormati hak kolektif desa (Lai dan Bosin, 2016: 124), desa merupakan salah satu organisasi yang mempunyai peranan penting dalam keberhasilan penyelenggaraan negara.

Dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Pasal 78 UU No. Pasal 4 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mengembangkan sarana dan prasarana desa yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Potensi ekonomi lokal dikembangkan dan sumber daya alam dan lingkungan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pembangunan desa mempunyai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pembangunan pada hakikatnya adalah suatu proses perubahan

yang dilaksanakan secara sadar dan sistematis, yang dipandu melalui tahapan-tahapan pembangunan dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup demi kepentingan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan tujuan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Dana yang diterima oleh pemerintah daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: daerah pendapatan utama meliputi: Bagian negara dan pajak wajib dan kelayakannya di daerah. Sehingga proyek-proyek pemerintah dapat dilaksanakan di daerah yang dibiayai oleh APBN, termasuk anggaran provinsi (Suseno, 2013:345) karena persyaratan dan kewajiban mengenai kecukupan sumber keuangan yang tersedia . (Wasistiono, 2006: 107) Pembiayaan merupakan elemen penting dari Program pendapatan menyatakan sama dengan yayasan dan dukungan pengguna kekuasaan. Karena desa diakui memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, sumber keuangan memiliki keterkaitan bahwa semua tujuan dari semua pengaturan tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dimana negara memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan dan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan rakyat kesejahteraan.

Pembangunan infrastruktur jalan dapat membantu menciptakan lapangan kerja di industri konstruksi, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri terkait. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan, pertumbuhan, meningkatkan kualitas hidup, dan meningkatkan pergerakan barang. Ketersediaan infrastruktur yang baik akan memberikan dampak positif bagi aktivitas warga atau masyarakat. Di sisi lain, jika infrastruktur buruk, kemungkinan akan berdampak negatif bagi masyarakat, seperti terganggunya transportasi untuk membawa hasil panen. Oleh karena itu, pemerintah dapat memberikan yang terbaik atau memfasilitasi dengan infrastruktur yang baik, yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, (Mustafa, Cahyo Sasmito, 2017).

Keberhasilan dalam satu bangsa dalam pembangunan nasional merupakan ukuran kesejahteraan suatu bangsa dari segi kesejahteraan penduduknya, dalam hal ini pembangunan fisik dari segi kesejahteraan sosial.

Pemberlakuan Hukum dilaksanakan untuk memberdayakan seluruh elemen masyarakat dan melaksanakan pembangunan terbuka berlandaskan tata pemerintahan yang baik. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang dapat disusun menurut beberapa aturan kewenangan daerah menjadi pusat berfungsinya sistem pemerintahan kabupaten/kota untuk

mengatur dan mengukur kehidupan masyarakat menurut peraturan perundang-undangan di berbagai daerah. Hal ini karena sebagian tanggung jawab administrasi publik dialihkan ke pemerintah kabupaten/kota termasuk pendanaan untuk meningkatkan kesejahteraan umumnya pada semua lapisan masyarakat (Nurman 2015:247).

Untuk meningkatkan PAD kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan industri daerah dengan mendorong lebih banyak investasi daerah untuk mengoptimalkan potensi daerah. Pemerintah melakukannya dengan mendorong tumbuhnya usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai bagian dari sektor industri, misalnya dengan membangun infrastruktur yang lebih baik, mengembangkan inovasi produk dan regulasi untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis, yang memperkuat sektor lokal. Penghasilan. (PAD) Kabupaten/Kota. (Cahyo Sasmito dkk. 2020:112).

Prioritas kebijakan program pembangunan di desa pendem, kecamatan junrejo kota batu belum berjalan efektif dalam menanggulangi permasalahan yang ada di Desa Pendem terutama, permasalahan di bidang bidang pelaksanaan pembangunan Desa yaitu Salah satunya terjadinya genangan air pada jalan penghubung antara desa, sehingga jalan tidak dapat dilewati pada musim hujan. Sehingga perencanaan merupakan upaya untuk mencapai kesejahteraan dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat desa. Negara ada tanggung jawab dan tugas yang sangat penting untuk mengatur rencana dapat dilakukan ke depan dalam bidang pembangunan disegala bidang seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan pariwisata, pertanian dan yang mampu memberikan dampak yang baik mensejahterakan masyarakat agar mengharapkan lebih memperhatikan pertimbangan kepentingan umum dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga apa yang direncanakan dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Peneliti menarik pada penelitian **“Peran Pemerintah Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Pembangunan Infrastruktur di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo Kota Batu”**.

1.2 Perumusan Masalah

Para peneliti merumuskan yaitu:

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu?

2 .Apa faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Jelaskan peran kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur.
- 2 Mengidentifikasi unsur-unsur yang mendorong dan menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat baik secara akademis dan praktis

1. Manfaat Akademis

Tujuan penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan informasi tentang fungsi pengelolaan desa untuk kemajuan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur.

2.Manfaat praktis

a) Bagi Peneliti

Dimaksudkan melalui pembangunan infrastruktur di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu, peneliti dapat mengambil manfaat dan mempelajari lebih dalam tentang fungsi pemerintahan desa untuk kesejahteraan umum.

B. Untuk Pemerintah Desa Pendem

Sumbangan kepada pemerintah desa dapat membantu mereka memahami nilai pekerjaan pembangunan dan dapat menekankan betapa pentingnya pembangunan infrastruktur bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA.

BUKU

- Arsiyy Wardatul. 2007. *Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Melalui Usaha Tambak*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Djama'an Satoria Dan Komariah 2010 *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Fahrudin Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Kodoatie, Robert J., 2003 *Manajemen dan Rekayasa Infastruktur*, Pusat Pelajar, Yogyakarta.
- Nurman. 2015 . *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Perseda
- Ryaas Rasyid, 2010. *Memahami Ilmu Pemerintah*. Jakarta PT. Raja Grafindo
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Soekarno, Soejono. 2012 *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Rajawali Grafindo Perseda.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif Kuntitatif dan R&D*, Banung: Alfabeta
- Sarwono, 2006, *Meteorologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet, CV. Persada.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, *Manajemen Pembangunan*, Haji, Masagung, Jakarta, 1991.
- Widjaja, HAW., Prof. Drs., 2003, *Pemerintah Desa/ Marga*, PT. Raja Grafindo Perseda, Jakarta.

JURNAL

- Fared, Moh Dan Noora Fitthriana. 2016. *Implementasi Kebijakan Musyawarah*

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik:

Vol. 5, No. 2.

Juraidah. (2015). *Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Mendik Karya Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser. eJournal Administrasi Negara, 3 (4) 2015: 1145 - 1157.*

Kasse, Winfrit, Dkk. 2017. *Analisis Perbandingan Partisipasi Masyarakat Kawasan Pembangunan Dengan Kawasan Perkampungan Dalam Perencanaan Pembangunan, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik: Vol.*

Pramana, Gilang. 2013. *Pembangunan Fisik dan Non- fisik di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kertanegara. Ejournal Ilmu Administrasi Negara, Vol,1,Nomor1.Hal587. diakses pada tanggal 13 November 2018*

Ruru, J. M. (N.D.). *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Ada Di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat. 30-36.*

Sasmito, Mustafa. 2017. *Implementasi Pembangunan Infastruktur Jalan Desa. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.6*

Sasmito Cahyo Dkk, 2020. *Manajemen Kebijakan Publik Sektor Pariwisata, CV IRDH.*

Suryo, Agus. 2010. *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan.Malang : UB Press. Hal diakses pada tanggal 4 November 2018*

UNDANG-UNDANG

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infastruktur. Diakses pada tanggal 21 Juni 2001.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/57281/keppres-no-81-2001>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Diakses pada tanggal 8 Februari 2022

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah

Diakses pada tanggal 30 September 2014

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>